

TATA KELOLA WISATA HUTAN MANGROVE DI DESA OGOMOLOS KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Anggi Apriliani ^{1*}; Muh. Nawawi ²; Irwansyah Kamindang ³;

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; anggiapriliani@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; muhnawawi@yahoo.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; bungiwani2021@gmail.com

*Correspondence : anggiapriliani@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *tata kelola wisata, hutan mangrove, koordinasi antar pemangku kepentingan, manajemen krisis destinasi, pemasaran destinasi*

Received : Maret 2026

Revised : April 2026

Accepted : April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos. Penelitian menggunakan teori *Destination Management Organization* (DMO) oleh Angelo Presenza (2005), yang mencakup *Coordination Tourism Stakeholder* (Koordinasi antar pemangku kepentingan), *Destination Crisis Management* (Manajemen krisis destinasi), dan *Destination Marketing* (Pemasaran destinasi) (Presenza & Ritchie, 2005). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum optimal. Hal ini ditandai oleh koordinasi pemangku kepentingan yang belum berkelanjutan, belum adanya perencanaan mitigasi risiko yang memadai, keterbatasan sarana prasarana dan kapasitas SDM, serta pemasaran yang masih konvensional sehingga destinasi wisata belum dikenal secara luas. Kesimpulannya, tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum optimal akibat lemahnya manajemen krisis, pemasaran destinasi yang kurang efektif, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum terintegrasi sepenuhnya.

ABSTRACT

This study aims to determine the governance of mangrove forest tourism in Ogomolos Village. The study uses the Destination Management Organization (DMO) theory by Angelo Presenza (2005), which includes Coordination of Tourism Stakeholders, Destination Crisis Management, and Destination Marketing. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the governance of mangrove forest tourism in Ogomolos Village is not optimal. This is characterized by unsustainable stakeholder coordination, the absence of adequate risk mitigation planning, limited infrastructure and human resource capacity, and conventional marketing so that

the tourist destination is not widely known. In conclusion, the governance of mangrove forest tourism in Ogomolos Village is not optimal due to weak crisis management, ineffective destination marketing, and coordination between stakeholders that is not fully integrated.

e-mail: jsipjurnal@gmail.com

Pendahuluan

Tata kelola wisata menjadi aspek penting dalam pengembangan destinasi wisata desa, terutama destinasi berbasis lingkungan seperti wisata hutan mangrove, karena melibatkan banyak pihak serta menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan (Darwis *et al.*, 2025). Tata kelola wisata yang baik menentukan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan sumber daya, serta keberlanjutan pengelolaan destinasi dalam jangka panjang (Pratiwi & Hulu, 2025). Oleh karena itu, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan destinasi agar mampu memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal (Wahyundi *et al.*, 2023). Salah satu bentuk pariwisata yang membutuhkan tata kelola yang cermat adalah wisata berbasis ekosistem mangrove. Kawasan mangrove memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai destinasi ekowisata, tetapi juga sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi, habitat berbagai jenis biota laut, serta penyangga keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat pesisir. Pemanfaatan kawasan mangrove sebagai objek wisata harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang justru mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove itu sendiri (Prihadi *et al.*, 2025).

Secara normatif, pengembangan pariwisata di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menekankan prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal (Indonesia, 2009). Landasan hukum ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, yang ditandai dengan pergeseran paradigma dari sekadar industri pariwisata menjadi sebuah ekosistem kepariwisataan yang lebih terpadu. Perubahan ini secara eksplisit mengedepankan aspek kualitas destinasi, ketahanan terhadap bencana, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan (Indonesia, 2025). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya desa, termasuk sektor pariwisata, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan wisata desa harus dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan (Indonesia, 2014).

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam pesisir, termasuk ekosistem mangrove yang tersebar di beberapa desa pesisir. Potensi ini membuka peluang pengembangan wisata berbasis lingkungan yang dapat mendukung perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Salah satu desa yang memiliki potensi wisata hutan mangrove adalah Desa Ogomolos yang terletak di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Sejak tahun 2020, Pemerintah Desa Ogomolos mulai mengembangkan kawasan hutan mangrove sebagai objek wisata. Sebagai bentuk dukungan awal, pemerintah desa mengalokasikan dana desa sebesar Rp 100.000.000 pada tahun 2021 untuk pembangunan jembatan kayu sebagai akses utama pengunjung dalam menyusuri kawasan mangrove. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pengembangan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum menunjukkan hasil yang optimal.

Hal ini tercermin dari koordinasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat yang telah terjalin, namun belum maksimal dan berkelanjutan. Kerja sama yang ada masih bersifat situasional, belum didukung pembagian peran yang jelas serta mekanisme koordinasi yang terstruktur. Selain itu, pengelolaan krisis destinasi belum dilengkapi perencanaan mitigasi risiko yang memadai. Selain itu, dari aspek pemasaran, promosi wisata masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan media digital secara optimal. Ketiadaan strategi branding dan publikasi yang terencana menyebabkan destinasi belum dikenal luas di luar wilayah desa. Permasalahan empiris yang dihadapi dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata. Akses jalan menuju lokasi wisata masih dalam kondisi kurang baik, petunjuk arah menuju kawasan wisata masih minim, serta fasilitas umum seperti area parkir, toilet, dan tempat istirahat bagi pengunjung belum tersedia secara memadai. Selain itu, kondisi fisik kawasan mangrove di beberapa bagian belum terkelola dengan baik, yang terlihat dari kurang terawatnya vegetasi mangrove. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kenyamanan pengunjung dan berimplikasi pada minimnya daya tarik wisata.

Sarana pendukung wisata yang tersedia saat ini masih terbatas pada jembatan kayu, papan informasi sederhana, serta sekretariat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pusat koordinasi pengelolaan. Meskipun fasilitas tersebut telah ada, jumlah dan kualitasnya belum memadai untuk mendukung pengelolaan wisata hutan mangrove secara profesional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang dimiliki Desa Ogomolos dengan kapasitas tata kelola yang tersedia di tingkat desa. Dalam tata kelola wisata hutan mangrove, pengelolaan tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, Pokdarwis, dan pelaku usaha. Di Desa Ogomolos, peran pemerintah desa,

masyarakat, dan Pokdarwis sudah mulai terlihat, namun koordinasi antar pemangku kepentingan tersebut belum berjalan secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai tata kelola mangrove menunjukkan temuan yang relatif serupa. Penelitian (Sulistiyawati, 2018) di Kabupaten Nunukan menemukan bahwa penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan wisata mangrove belum optimal, terutama pada aspek partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian (Alamsyah *et al.*, 2024) di Kota Makassar juga menunjukkan bahwa tata kelola mangrove belum efektif akibat degradasi lingkungan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Sementara itu, penelitian (Efendi & Astuti, 2021) di Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan kolaboratif antar lembaga dalam pengembangan ekowisata mangrove. Penelitian oleh (Wijaya *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan dipengaruhi oleh peran *Destination Management Organization* (DMO) yang kuat dalam memperkuat koordinasi pemangku kepentingan dan kelembagaan pengelolaan destinasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove membutuhkan tata kelola yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif tata kelola seperti partisipasi dan transparansi, tetapi juga menyangkut bagaimana destinasi dikelola secara operasional dan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memilih pendekatan *Destination Management Organization* (DMO) oleh Angelo Presenza (2005) yang meliputi aspek *coordination of tourism stakeholders, destination crisis management, dan destination marketing* dibandingkan *good governance* atau *collaborative governance*, karena DMO secara khusus dirancang untuk menganalisis pengelolaan destinasi wisata sebagai sebuah sistem yang menekankan koordinasi antar pemangku kepentingan, manajemen krisis destinasi, serta strategi pemasaran yang terarah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam tata kelola hutan mangrove di Desa Ogomolos, menghasilkan enam informan yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPDAS Palu Poso, Ketua Pokdarwis, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Pengunjung Wisata Hutan Mangrove. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu; 1) observasi pada kawasan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, 2) wawancara mendalam terhadap informan terkait yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025, dan 3) dokumentasi berupa dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2020 tentang RTRW, dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, RKPDes, Laporan kegiatan pengelolaan wisata mangrove, dan dokumen perencanaan pembangunan berbasis lingkungan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup empat tahapan; *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

Hasil

1. Profil Desa Ogomolos

Nama Ogomolos berasal dari bahasa Lauje yang berarti “air kecil”, merujuk pada kondisi wilayah yang sering tergenang akibat dataran rendah dan aliran sungai yang belum terkendali. Secara administratif, Desa Ogomolos memiliki luas sekitar 9 km² dan terletak di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, Desa Ogomolos memiliki luas wilayah kurang lebih 461,730 hektar. Wilayah ini terbagi ke dalam empat dusun, yang masing-masing memiliki karakteristik serta potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Lokasi Desa Ogomolos berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Parigi Moutong, dengan koordinat geografis 120.7388° bujur timur dan 0.55630° lintang utara. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten ke desa ini sekitar 221 kilometer, yang dapat ditempuh melalui jalur darat. Secara demografis, Desa Ogomolos memiliki jumlah penduduk sebanyak 972 jiwa yang tersebar dalam 289 kepala keluarga. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah 499 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 473 jiwa. Berdasarkan karakteristik mata pencaharian, mayoritas penduduk Desa Ogomolos bekerja sebagai nelayan dan petani pekebun. Hal ini sejalan dengan potensi sumber daya alam setempat, yang meliputi komoditas unggulan seperti ikan bandeng, udang, hasil laut, serta produk pertanian.

2. *Coordination Tourism Stakeholder*

Dalam konteks pengembangan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos, idealnya koordinasi antar pemangku kepentingan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program wisata. Pemerintah desa berperan sebagai pengarah dan fasilitator, memastikan setiap program berjalan sesuai dengan rencana pembangunan desa dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Pokdarwis dan masyarakat lokal berperan aktif dalam operasional harian destinasi, termasuk pengelolaan fasilitas, penyediaan layanan bagi pengunjung, serta pemeliharaan ekosistem hutan mangrove.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan

dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos telah melibatkan beberapa aktor utama, yaitu pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal, serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu-Poso. Keterlibatan pemerintah desa terlihat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sementara Pokdarwis dan masyarakat berperan dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Adapun keterlibatan BPDAS bertujuan memastikan pengelolaan kawasan wisata sejalan dengan prinsip konservasi ekosistem mangrove dan pengelolaan sumber daya lingkungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos telah berjalan melalui berbagai bentuk kolaborasi yang saling melengkapi, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan dan keberlanjutan program. Pertama, Pemerintah Desa Ogomolos mengajukan proposal pendanaan sebesar Rp 500.000.000 kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu-Poso guna mendukung pelaksanaan penanaman pohon mangrove bertujuan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem. Kedua, Pedagang yang berjualan di sekitaran lokasi wisata juga turut membayar iuran sebesar Rp 400.000 per bulan, meskipun kontribusinya hanya terpusat pada penyaluran iuran dan tidak memiliki akses lebih pada persoalan kawasan wisata, ketiga, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar turut serta menjaga, merawat, dan mengembangkan potensi wisata mangrove secara berkelanjutan.

Meskipun telah terjalin hubungan koordinasi, namun, dari sudut pandang *Destination Management Organization DMO*, koordinasi yang efektif idealnya didukung oleh mekanisme formal, seperti standar operasional prosedur (SOP) serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dengan pihak swasta di Desa Ogomolos belum berjalan optimal, karena pelaku usaha belum dilibatkan secara substansial dalam forum perencanaan, pengambilan keputusan, maupun evaluasi pengelolaan wisata. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip inklusivitas sebagaimana ditekankan dalam teori DMO.

3. Destination Crisis Management

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan manajemen krisis destinasi (*Destination Crisis Management*) pada tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos masih menunjukkan keterbatasan, terutama terkait keterpaduan peran antar pemangku kepentingan. Peran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu-Poso sejauh ini terbatas pada pemberian dukungan pendanaan untuk kegiatan penanaman mangrove, sedangkan tanggung jawab pengawasan destinasi serta penanganan potensi

krisis masih terpusat pada pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik manajemen krisis belum dilaksanakan secara terintegrasi, melainkan masih bersifat parsial dan belum melibatkan seluruh aktor pengelola destinasi secara komprehensif.

Kepala Sub bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu–Poso menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan mekanisme kolaboratif dalam penerapan manajemen krisis destinasi. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab utama pengelolaan wisata perlu membangun sinergi yang lebih erat dengan masyarakat lokal, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, serta lembaga teknis terkait. Dalam kerangka DMO, sinergi tersebut tidak hanya mencakup komunikasi rutin dan pertukaran informasi, tetapi juga keterlibatan seluruh aktor dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan lapangan, serta penanganan potensi risiko yang dapat mengancam keberlanjutan destinasi wisata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kejelasan pembagian peran menjadi faktor krusial dalam membangun sistem manajemen krisis yang efektif. Pemerintah desa berperan pada koordinasi strategis dan penetapan kebijakan pengelolaan destinasi, sementara Pokdarwis dan masyarakat lokal dapat menjalankan fungsi operasional melalui pemantauan kondisi lapangan, pelaksanaan program konservasi, serta mitigasi risiko secara langsung. Pelaku usaha memiliki peran pendukung melalui penyediaan informasi terkait aktivitas ekonomi dan dinamika kunjungan wisatawan, sedangkan lembaga teknis seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu–Poso dapat berkontribusi melalui dukungan pendanaan, penyediaan sumber daya, serta rekomendasi teknis terkait mitigasi risiko lingkungan, khususnya pada aspek pelestarian ekosistem mangrove.

Temuan observasi juga memperlihatkan bahwa sejumlah fasilitas pendukung wisata, seperti jembatan kayu di kawasan mangrove, papan informasi, serta sekretariat Pokdarwis, berada dalam kondisi kurang terawat dan belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang memadai. Tidak adanya petugas khusus yang secara formal bertanggung jawab terhadap keamanan pengunjung menyebabkan fungsi pengawasan dijalankan secara informal oleh anggota Pokdarwis dan masyarakat sekitar. Situasi ini menimbulkan risiko keselamatan pengunjung dan meningkatkan kerentanan destinasi terhadap krisis operasional, terutama pada saat terjadi lonjakan kunjungan atau kondisi cuaca ekstrem.

4. Destination Marketing

Pemerintah Desa Ogomolos telah berupaya menyediakan media promosi resmi melalui website desa sebagai sarana penyampaian informasi publik dan pengenalan potensi wisata hutan mangrove. Namun, dalam pengelolaan website tersebut

menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas pengelolaan. strategi promosi yang saat ini kami lakukan lebih difokuskan pada pemanfaatan media sosial, khususnya melalui akun *Facebook* desa. Media sosial dipilih karena dinilai lebih mudah diakses dan dikelola oleh aparat desa, serta memiliki jangkauan yang relatif luas. Akun tersebut dikelola secara langsung oleh perangkat desa dan digunakan untuk membagikan berbagai informasi terkait aktivitas wisata, kondisi kawasan mangrove, serta dokumentasi kunjungan wisatawan.

Berdasarkan temuan penelitian, strategi pemasaran destinasi wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos masih menunjukkan keterbatasan yang berpotensi membatasi daya saing destinasi, terutama dalam menghadapi persaingan dengan destinasi wisata sejenis di wilayah lain. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi mencerminkan adanya inisiatif pemerintah desa dalam merespons perkembangan pemasaran digital. Namun, keterbatasan variasi konten, perencanaan promosi yang belum terstruktur, serta ketiadaan strategi pemasaran jangka panjang menjadi tantangan serius dalam upaya membangun citra destinasi yang berkelanjutan.

Hasil wawancara sekretaris desa selaku salah satu informan, dapat dinyatakan bahwa pemasaran destinasi wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos hingga saat ini masih dilakukan secara terbatas dan belum terintegrasi, karena hanya bertumpu pada pemanfaatan akun media sosial *Facebook* desa sebagai sarana utama promosi. Tidak optimalnya pengelolaan *website* desa sebagai media promosi resmi menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan, baik dari sisi sumber daya manusia, keberlanjutan pembaruan konten, maupun dukungan teknis. Kondisi ini menyebabkan strategi pemasaran destinasi belum berkembang secara sistematis dan cenderung bersifat pragmatis, yakni memilih media yang paling mudah diakses dan dikelola oleh aparat desa. Ketergantungan pada satu kanal promosi, yaitu *Facebook*, mengindikasikan bahwa praktik *Destination Marketing* di Desa Ogomolos masih berada pada tahap dasar (*early stage*). Meskipun media sosial tersebut memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan dan potensi jangkauan, namun keterbatasan variasi *platform* promosi berimplikasi pada sempitnya segmentasi pasar wisatawan yang dapat dijangkau.

Pembahasan

1. Coordination Tourism Stakeholder

Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos telah ada dan berjalan, namun belum terlembaga secara formal dalam suatu sistem koordinasi yang jelas dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah desa yang secara konsisten melibatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) serta masyarakat lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pengembangan destinasi wisata. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada konsultasi atau pemberitahuan, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan wisata.

Pendekatan *Destination Management Organization* (DMO) menekankan bahwa pengelolaan destinasi wisata memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, sebagai bagian dari sistem tata kelola destinasi. (Purboyo *et al.*, 2019). Konsep DMO memandang pelaku usaha tidak hanya sebagai penyumbang pendapatan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang berperan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan destinasi (Maldini *et al.*, 2023). Keterbatasan partisipasi pelaku usaha di Desa Ogomolos menunjukkan bahwa fungsi koordinasi yang ideal sebagaimana ditekankan pada konsep DMO belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, koordinasi antar pemangku kepentingan telah berlangsung pada pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos melalui keterlibatan pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan dan konservasi. Koordinasi tersebut umumnya terwujud melalui musyawarah dan kerja sama di tingkat operasional yang bersifat fleksibel serta menyesuaikan kebutuhan lapangan. Namun, koordinasi yang terbangun masih didominasi oleh pola hubungan informal dan interaksi personal, serta belum didukung oleh wadah koordinasi resmi, aturan tertulis, maupun pembagian peran yang jelas dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan masih bersifat selektif dan belum sepenuhnya inklusif. Pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos telah melibatkan pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat lokal secara aktif, namun pelibatan pelaku usaha masih terbatas pada aspek ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan di lapangan dan prinsip DMO yang menekankan pentingnya sinergi dan integrasi peran seluruh aktor untuk mencapai keberlanjutan destinasi wisata.

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, koordinasi antar pemangku kepentingan telah berlangsung pada pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos melalui keterlibatan pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan dan konservasi. Koordinasi tersebut umumnya terwujud melalui musyawarah dan kerja sama di tingkat operasional yang bersifat fleksibel serta menyesuaikan kebutuhan lapangan. Namun, koordinasi yang terbangun masih didominasi oleh pola hubungan informal dan interaksi personal, serta belum didukung oleh wadah koordinasi resmi, aturan tertulis, maupun pembagian peran yang jelas dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, koordinasi antar pemangku kepentingan telah berlangsung pada pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos melalui keterlibatan pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis), dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan dan konservasi. Koordinasi tersebut umumnya terwujud melalui musyawarah dan kerja sama di tingkat operasional yang bersifat fleksibel serta menyesuaikan kebutuhan lapangan. Namun, koordinasi yang terbangun masih didominasi oleh pola hubungan informal dan interaksi personal, serta belum didukung oleh wadah koordinasi resmi, aturan tertulis, maupun pembagian peran yang jelas dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ragentu dkk. (2025) mengenai pengelolaan objek wisata Air Terjun Saluopa di Kabupaten Poso yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola wisata, serta masyarakat setempat. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa penguatan kerja sama dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan destinasi yang partisipatif dan berkelanjutan (Ragentu & Pradana, 2025).

Mengacu pada pendekatan *Destination Management Organization* (DMO), koordinasi merupakan fungsi utama dalam tata kelola destinasi yang seharusnya mampu mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan destinasi melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Kondisi pengelolaan di Desa Ogomolos menunjukkan bahwa fungsi koordinasi tersebut baru berjalan pada tingkat operasional dan belum berkembang menjadi sistem pengelolaan destinasi yang terorganisir secara formal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Kamindang *et al.*, 2025). yang menyatakan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip normatif seperti transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengoordinasikan dan mengarahkan interaksi berbagai aktor dalam jaringan tata kelola. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum berjalan secara optimal, karena belum mampu membentuk tata kelola destinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana prinsip yang ditekankan dalam konsep DMO.

2. Destination Crisis Management

Berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur penanganan krisis, baik yang berkaitan dengan kerusakan fasilitas, gangguan lingkungan, maupun situasi darurat di kawasan wisata. Penanganan berbagai permasalahan masih dilakukan secara situasional dan bergantung pada inisiatif pemerintah desa, Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen krisis belum dirancang secara sistematis dan preventif, melainkan masih bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan.

Ditinjau dari perspektif *Destination Management Organization* (DMO), kondisi tersebut menunjukkan lemahnya fungsi manajemen krisis sebagai bagian dari tata kelola destinasi. Presenza menekankan bahwa manajemen krisis dalam DMO berperan penting untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan destinasi (Haris *et al.*, 2023). Dalam konteks Desa Ogomolos, terdapat tiga risiko utama yang belum dikelola secara optimal. Pertama, risiko lingkungan, yang muncul akibat minimnya sistem pengawasan dan perawatan fasilitas di kawasan ekosistem mangrove yang rentan terhadap kerusakan. Kedua, risiko keberlanjutan finansial, karena kerusakan fasilitas dan menurunnya rasa aman pengunjung berpotensi mengurangi minat kunjungan dan berdampak pada pendapatan desa serta masyarakat. Ketiga, risiko kelembagaan, yang ditandai dengan belum adanya pembagian peran, prosedur kerja, dan mekanisme koordinasi formal dalam penanganan krisis.

Berdasarkan pernyataan informan, pengelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum pernah memperoleh pelatihan khusus terkait manajemen krisis, mitigasi bencana, maupun pengawasan destinasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengidentifikasi risiko, memprediksi potensi krisis, serta merancang langkah penanganan yang sistematis dan terencana. Keterbatasan tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa Manajemen Krisis Destinasi (*Destination Crisis Management*) belum terintegrasi secara menyeluruh dalam strategi pengelolaan wisata.

Dalam perspektif *Destination Management Organization* (DMO), pengelolaan destinasi menuntut adanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian, serta mitigasi risiko secara berkelanjutan (Wijaya *et al.*, 2022). DMO tidak hanya berperan dalam pengembangan dan promosi destinasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan kesiapsiagaan destinasi terhadap berbagai potensi krisis. Oleh karena itu, ketiadaan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola menunjukkan bahwa fungsi manajerial DMO, khususnya dalam aspek manajemen krisis, belum berjalan optimal.

Kondisi tersebut tercermin pada praktik pengawasan destinasi yang masih dilakukan secara sederhana dan konvensional melalui penjagaan rutin tanpa didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Pengelola belum memiliki pedoman tertulis terkait identifikasi risiko, pemetaan kerawanan bencana, maupun mekanisme penanganan krisis yang terstruktur. Dalam kerangka DMO, pengawasan seharusnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan destinasi yang terintegrasi, berorientasi pada pencegahan krisis, dan dilaksanakan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan di Desa Ogomolos masih bersifat administratif dan operasional semata, belum berkembang menjadi instrumen strategis

dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan destinasi wisata hutan mangrove. Hal ini sejalan dengan penelitian Fajar Alamsyah (2024) yang menemukan bahwa tata kelola mangrove di Kota Makassar belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi kelembagaan serta belum adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove (Alamsyah *et al.*, 2024).

3. *Destination Marketing*

Destination Marketing (Pemasaran destinasi) merupakan salah satu elemen fundamental dalam tata kelola pariwisata yang berfungsi sebagai jembatan antara potensi destinasi dengan persepsi serta minat wisatawan. Aspek ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan promosi teknis, tetapi sebagai proses strategis yang mencakup perencanaan, pengemasan informasi, komunikasi publik, serta pembentukan citra destinasi secara berkelanjutan (Urban & Sari, 2022). Berdasarkan temuan penelitian, strategi pemasaran destinasi wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos masih menunjukkan keterbatasan yang berpotensi membatasi daya saing destinasi, terutama dalam menghadapi persaingan dengan destinasi wisata sejenis di wilayah lain.

Selain promosi melalui media sosial, pemasaran destinasi juga berlangsung secara informal melalui mekanisme komunikasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Informasi mengenai keberadaan dan daya tarik wisata umumnya diperoleh calon pengunjung melalui pengalaman dan rekomendasi langsung dari pengunjung sebelumnya. Dalam kerangka DMO, praktik *word of mouth* dapat menjadi indikator positif atas kualitas pengalaman wisata yang dirasakan pengunjung. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap promosi informal juga menunjukkan lemahnya fungsi *destination marketing* secara kelembagaan, karena citra destinasi belum dibangun melalui strategi komunikasi yang terencana dan terkoordinasi.

Berdasarkan temuan penelitian, aspek pemasaran destinasi wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos menunjukkan bahwa pengelolaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari pola promosi wisata yang masih bersifat sederhana, tidak terencana, dan belum dikelola secara profesional. Strategi pemasaran yang dijalankan belum menunjukkan adanya perencanaan yang sistematis maupun pemanfaatan media promosi secara terpadu untuk membangun citra destinasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata memerlukan kolaborasi serta komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan sebagai upaya mendukung pengembangan pariwisata yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan (Mashita *et al.*, 2025).

Ketergantungan yang tinggi terhadap promosi *word of mouth* juga memperkuat kondisi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya (2022) yang menyatakan

bahwa destinasi wisata berbasis alam yang belum didukung oleh strategi pemasaran digital cenderung hanya dikenal dalam lingkup lokal dan memiliki tingkat kunjungan yang relatif rendah. Situasi serupa terlihat pada wisata hutan mangrove Desa Ogomolos, di mana lemahnya pengelolaan pemasaran berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran wisatawan serta terbatasnya jumlah kunjungan (Wijaya *et al.*, 2022). Merujuk pada penelitian terdahulu, penelitian ini mempertegas bahwa persoalan pemasaran destinasi masih menjadi masalah dominan dalam pengelolaan wisata mangrove, terutama pada skala desa. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian bukti empiris bahwa lemahnya pemasaran destinasi baik dari sisi kelembagaan, pemanfaatan media digital, maupun perencanaan promosi berkorelasi langsung dengan rendahnya kunjungan wisatawan dan belum terbentuknya citra destinasi yang kuat.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa lemahnya manajemen krisis dan koordinasi antar pemangku kepentingan berdampak langsung pada tidak optimalnya pemasaran destinasi wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos. Dalam kerangka *Destination Management Organization* (DMO), efektivitas pemasaran destinasi sangat bergantung pada kesiapan destinasi serta kekuatan sistem pengelolaannya. Ketika koordinasi belum terlembaga dan manajemen krisis tidak berjalan secara terencana, promosi wisata cenderung bersifat sporadis dan tidak didukung oleh jaminan kualitas destinasi yang berkelanjutan. Kondisi ini terlihat dari belum jelasnya branding destinasi, tidak adanya kalender event wisata, serta belum terencananya promosi digital yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos telah berlangsung melalui keterlibatan aktif pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan. Koordinasi tersebut masih didominasi oleh pola informal, belum terlembaga dalam sistem yang terstruktur, serta belum didukung oleh aturan tertulis dan pembagian peran yang jelas. Keterlibatan pelaku usaha masih terbatas sehingga menunjukkan bahwa prinsip integrasi dan sinergi dalam pendekatan *Destination Management Organization* (DMO) belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi koordinasi baru berjalan pada tingkat operasional dan belum mampu membentuk tata kelola destinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Aspek manajemen krisis dan pemasaran destinasi menunjukkan kelemahan yang signifikan. Ketidadaan SOP, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan risiko yang masih bersifat reaktif menandakan bahwa manajemen krisis belum terintegrasi dalam tata kelola destinasi. Kondisi tersebut berdampak pada strategi pemasaran yang masih sederhana, tidak terencana, dan bergantung pada promosi informal seperti *word of mouth*. Dalam kerangka DMO, lemahnya koordinasi dan

manajemen krisis berimplikasi pada rendahnya efektivitas pemasaran destinasi, sehingga citra destinasi belum terbentuk secara kuat dan tingkat kunjungan wisatawan masih terbatas. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta pengembangan strategi pemasaran yang terintegrasi menjadi kebutuhan untuk mewujudkan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Muh. Nawawi, M.Si, dan Bapak Irwansyah Kamindang, S.IP., M.Si, yang telah memberikan waktunya, membimbing, memberikan kritik dan saran juga arahan kepada penulis. Terimakasih juga kepada informan yang telah meluangkan waktunya dalam proses wawancara. Ucapan terimakasih juga turut penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Alamsyah, F., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Makassar, U. M. (2024). *Tata Kelola Mangrove Berkelanjutan Dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim Di Kota Makassar*.
- Darwis, H., Muda, K. T., Hayati, R., & Mappasomba, Z. (2025). *Studi Kasus Eksploratif Tentang Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Komunitas Di Destinasi Ekowisata Mangrove Banua Pangka , Luwu Timur*. 13(2).
- Efendi, M., & Astuti, S. J. W. (2021). *Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia Muhammad Efendi , Sri Juni Woro Astuti Abstrak*. 1, 105–135.
- Haris, D. La, Syaukat, Y., Baga, L. M., & Barat, J. (2023). *Strategi Pengembangan Tata Kelola DMO Terintegrasi dan Berkelanjutan : Pendekatan Corporate Governance di Pulau Wangi-Wangi*. 11(1), 62–71.
- Indonesia. (2009). *undang-undang-nomor-10-tahun-2009-tentang-kepariwisataan.pdf*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 1.
- Indonesia, R. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.
- Kamindang, I., Masu, K. H., Asrifai, & Ahsan, S. C. (2025). *Good Governance Sebagai Meta Governance*. 2(12), 2197–2207.
- Maldini, M. R., Rahtomo, R. W., & Noerjamal, D. (2023). *Tourism Destination Governance Plan In The Region Ciwidey , Bandung District , Indonesia*. 2(2), 110–121. <https://doi.org/10.34013/ijscot.v1i02.1368>
- Mashita, P., Mahfuzat, & Abdi, fahmi S. (2025). *JSIP : Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Paralayang Wayu Di*

- Kecamatan*. 1(2), 31–40.
- Pratiwi, Y., & Hulu, M. (2025). *Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan : Studi Kasus TN Tanjung Puting , Kalimantan Tengah*. 8(2), 2–6.
- Presenza, A., & Ritchie, J. R. B. (2005). *Towards A Model Of The Roles And Activities Of Destination Management Organizations*.
- Prihadi, J., Mahmudin, T., Raharja, A. M., Bantulu, L., & Dinan, R. (2025). *KAWASAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE*. 14(September), 4301–4311. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1843>
- Purboyo, H., Putro, H., & Briliyanti, A. (2019). *The Effectivity Of Stakeholders ' Collaboration On Tourism Destination Governance*. 17, 25–37.
- Ragentu, A., & Pradana, A. (2025). *Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa Di Kabupaten Poso*. 01(05), 321–334.
- Sulistiyawati, W. (2018). *Tata kelola hutan mangrove di Kapupaten Nunukan*.
- Urban, W., & Sari, D. P. (2022). *Model Pemasaran Pada Destinasi Wisata Rural Dan Marketing Models In Rural Tourism Destinations And Urban Tourism*. 8(2), 134–137.
- Wahyundi, R. A., Widana, I. B. G. A., & Suasapha, A. H. (2023). *Strategi Tata Kelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Gilimanuk Menuju Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. *Journal of Applied Sciences in Tourism Destination*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.52352/jastd.v1i1.1067>
- Wijaya, A., Fasa, H., Berliandaldo, M., Andriani, D., Strategis, K., Bidang, D., Strategis, K., Strategis, M., Bidang, D., & Strategis, K. (2022). *IMPLIKASI PERAN DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO) – DESTINATION GOVERNANCE (DG) DALAM*. 21(2), 111–127. <https://doi.org/10.52352/jpar.v21i2.845>